

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi	16
B. Teori Keadilan.....	17
C. Teori Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Pencegahan Yang Terjadi Dalam Sengketa Konstruksi	21
D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Bahan Hukum	43
E. Metode Pengumpulan dan Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Timbulnya Ketidakadilan Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Mengenai Penggunaan Dewan Sengketa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Usaha Konstruksi	46
1. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Dengan	

Penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi	46
2. Ketidakadilan Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi	54
B. Upaya Uji Materiil Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	58
1. Pengujian Materi Peraturan Menteri	58
2. Analisis Yuridis Peraturan menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Mengenai Penggunaan Dewan Sengketa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Konstruksi	63
3. Analisis Materi Muatan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76